



PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIPANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa Giripanggung Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019;

b. bahwa dengan adanya perubahan kegiatan, besaran pendapatan desa serta pergeseran anggaran antar jenis belanja dan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan sehingga perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Desa Giripanggung Tahun 2020;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

- 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penghargaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 8 Seri E);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 33);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 57);
  22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 58);
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
  24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Berita Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
  25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 68);
  26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019

tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);

27. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2014 Nomor 2);

28. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 2);

29. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA GIRIPANGGUNG

dan

KEPALA DESA GIRIPANGGUNG

Menetapkan : PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Giripanggung, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa Giripanggung sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Giripanggung yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD Desa Giripanggung yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Giripanggung.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa.
9. Perencanaan Desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di desa dalam jangka waktu tertentu.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa.

13. Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa dalam kurun waktu 6 (enam) dan 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
21. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat desa.
22. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut DURKP Desa adalah daftar prioritas kegiatan hasil musyawarah pembangunan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang Kecamatan untuk dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN, dan/atau sumber dana lainnya.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

## BAB II

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengembangan kehidupan masyarakat desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintahan desa wajib memperhatikan dan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistimatis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan berdasarkan prinsip-prinsip :
  - a. Kebersamaan;
  - b. Musyawarah mufakat;
  - c. Desentralisasi;
  - d. Berkelanjutan;
  - e. Berwawasan lingkungan;
  - f. Efektif dan efisien;
  - g. Kesetaraan dan keadilan gender;
  - h. Pemberdayaan;
  - i. Holistik;
  - j. Komitmen dan konsisten;
  - k. Kearifan lokal; dan
  - l. Kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan desa.

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

- a. Memperkuat otonomi dan kemandirian desa;
- b. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan desa;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- h. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan desa;
- i. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan desa;
- j. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan desa mencakup penyelenggaraan perencanaan fungsi pemerintahan desa yang meliputi semua bidang pembangunan secara terpadu dalam wilayah pemerintahan desa.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa;
  - b. RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) RKP Desa memuat prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa mencakup rencana pembangunan bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana, bidang pemerintahan, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi desa.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
  - c. Keuangan desa;
  - d. Profil, potensi, dan sumber daya desa;
  - e. Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebelumnya;
  - f. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemerintah desa dapat menyusun dokumen lain yang menyangkut potensi dan sumberdaya desa guna mendukung perencanaan pembangunan, yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa, swadaya masyarakat, dan/atau sumber dana lainnya.

### BAB IV

#### TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

#### Pasal 8

Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

### BAB V

#### PENYUSUNAN RKP DESA

#### Pasal 9

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP Desa sebagai penjabaran RPJMDesa.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan awal RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bahan Musrenbang Desa.
- (2) Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan secara partisipatif dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan kelompok masyarakat.
- (3) Pemerintah desa sebelum menyelenggarakan Musrenbang Desa, terlebih dahulu menyelenggarakan Pra Musrenbang Desa.
- (4) Pra Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap Padukuhan dengan melibatkan RT, RW, kelompok masyarakat, dan tokoh masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Daftar prioritas kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh desa melalui APB Desa.
  - b. DURKP Desa.
- (3) DURKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Musrenbang Kecamatan berpedoman pada PIWK.
- (4) RKP Desa disusun dengan mengacu pada RKPD.

#### Pasal 12

RKP Desa menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

#### Bagian Ketiga

#### Sistimatika Perencanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 13

- (1) Sistimatika penulisan RKP Desa, mencakup :
  - a. Pendahuluan, meliputi latar belakang, dasar hukum, pengertian, tujuan dan manfaat, dan visi misi desa;
  - b. Gambaran umum dan kebijakan keuangan desa, meliputi gambaran umum dan potensi desa, kebijakan keuangan desa yang meliputi kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa, dan kebijakan pembiayaan desa;

- c. Evaluasi program/kegiatan pembangunan, meliputi evaluasi pelaksanaan program RKP Desa tahun lalu, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, dan identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan.
- d. Rumusan prioritas program pembangunan desa, meliputi prioritas program dan kegiatan skala desa tahun yang akan datang dan prioritas program dan kegiatan skala kabupaten, provinsi, dan pusat;
- e. Penutup;
- f. Lampiran meliputi matriks program RKP Desa.

## BAB VI

### PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pengendalian dan Evaluasi

##### Pasal 14

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa dilakukan oleh Kepala Desa dibantu perangkat desa.
- (2) Perangkat desa menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan.

##### Pasal 15

- (1) Kepala Desa bersama perangkat desa lainnya melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan desa periode tahun sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan RKP Desa untuk periode tahun berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah desa melaporkan dokumen perencanaan pembangunan desa kepada Bupati.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RPJM Desa dan RKP Desa.

## BAB VII

### PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

## Perubahan RKP Desa

### Pasal 17

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan.
  - b. Keadaan karena adanya berbagai kebijakan.

## BAB VIII

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Dukuh mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungan padukuhan.

## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 19

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Ditetapkan di Giripanggung  
pada tanggal 13 Mei 2020

KEPALA DESA

ttd

NGADI

Diundangkan di Giripanggung  
pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DESA

ttd

EDY SUTANTYO

LEMBARAN DESA GIRIPANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 5

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Perubahan**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun. RKP Desa mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKP Desa merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa.
2. RKP Desa merupakan acuan bagi pemerintah desa dalam menentukan umum APBDes dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBDes.
3. RKP Desa merupakan instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

RKP Desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes guna memastikan APBDes telah disusun berlandaskan RKP Desa. Dalam hal RKP Desa tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan maka dapat dilakukan perubahan .

Memperhatikan adanya perubahan kebijakan dan kondisi actual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan perubahan RKP Desa dilakukan guna menampung perubahan pagu pendapatan, kegiatan, pagu belanja yang harus diakomodir dalam RKP DEsa Tahun 2020.

### **B. Dasar Hukum**

30. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

31. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
38. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
39. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
40. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
41. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
42. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;

43. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2014-2019;
44. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Des;
45. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 10 Tahun 2017;

### **C. Tujuan**

Perubahan Recana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perubahan perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan RKP Desa Giripanggung Tahun 2020 bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kondisi actual dalam tahun berjalan.

## BAB II

### KEBIJAKA PENDAPATAN DALAM PERUBAHAN RKP DESA

Dengan adanya perubahan kebijakan dan kondisi actual yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan menuntut dilakukan perubahan pagu pendapatan, kegiatan dan pagu belanja. Hal tersebut menyebabkan perlunya kebijakan mengubah rencana pendapatan dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan pendapatan dalam perubahan RKP Desa sebagai berikut :

No	Indikatif Program/Kegiatan Desa	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Desa (PADesa)</b>	<b>502.200.000</b>	<b>502.200.000</b>
<b>II</b>	<b>Kelompok Dana Transfer</b>	<b>2.056.711.400</b>	<b>1.912.156.700</b>
A	Dana Desa (APBN)	1.085.336.000	1.074.529.000
B	Alokasi Dana Desa (bagian dana pembangunan kabupaten)	829.400.100	745.838.400
C	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	91.975.300	41.789.300
D	Bantuan Keuangan		
	1.APBD Provinsi		
	2.APBD Kabupaten	50.000.000	50.000.000
<b>III</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>4.000.000</b>	<b>8.275.000</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.562.911.400</b>	<b>2.422.631.700</b>
	<b>Pembiayaan</b>		
	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
	Silpa Tahun Sebelumnya	37.414.380,27	98.890.893,27

**BAB III**  
**RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**  
**DALAM PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2020**

Dengan adanya perubahan kebijakan dan kondisi actual yang berkembang di tahun anggaran 2020 mengharuskan adanya perubahan RKP Desa tahun 2020 untuk menindaklanjuti perubahan kebijakan dan kondisi actual tersebut. Selain itu untuk meminimalkan resiko tidak tercapainya anggaran belanja akibat tidak terlaksananya kegiatan. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 berupa perubahan pagu anggaran, kegiatan, dan pagu belanja. Rencana program kegiatan dalam perubahan RKP Desa terlampir.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang ditetapkan dengan peraturan desa merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penentuan kebijakan umum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dokumen ini mampu mengkomunikasikan dan mesinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Ditetapkan di Giripanggung  
pada tanggal 13 Mei 2020

KEPALA DESA,

ttd

NGADI